

Antisipasi Temuan BPK dengan Tingkatkan Sistem Pengendalian

UJOH BILANG – Peningkatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang menjadi hal penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang mengatakan evaluasi menjadi langkah strategis di tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa temuan yang sama dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.

"Temuan yang berulang harus diminimalkan agar tidak kembali terjadi di tahun 2025. Sehingga penting untuk mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki," ujar Stephanus.

Dirinya menekankan pentingnya implementasi manajemen risiko di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya berharap seluruh OPD lebih serius memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Hal ini untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan," jelasnya.

Ia menambahkan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah bukan hanya tugas OPD tertentu, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Stephanus optimistis dengan kerja sama yang solid, Mahulu dapat memperbaiki sistem keuangan dan mempertahankan predikat baik dari BPK.

"Dengan komitmen bersama, kita dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel," pungkasnya. **(jih1023/ han/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Antisipasi Temuan BPK dengan Tingkatkan Sistem Pengendalian 27/01/2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.